

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawie Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland: Kluwer-Deventer.
- J.E Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (judul asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), diterjemahkan oleh tim penterjemah Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara.
- L.H.C Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Musdalifa R, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Makassar: Fakultas Hukum Unhas.
- Okie M.S. Siahaan, 2009, *Perilaku Menyimpang; Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT Indeks.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- S.R Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

- Angel Michelle Karinda, 2016, “Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 6.
- Bella Reza Dwi Putri, 2019, “Tinjauan kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.3 no. 2.

- Christina Martha Pasaribu, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 263 kitab Undang-Undang Hukum pidana (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No.45/Pid.B/2018/PT.Pol)”, Lex Privatum, Vol. IX No. 13.
- Ellisya, 2023, “Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2 No. 02.
- Emy Widya Kusumaningrum, 2016, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah” , Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3.
- Firmansyah Heri, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016)”, Era Hukum, Vol. 17, No. 1.
- Karinda Angel Michelle, 2016, “Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”, Lex Crimen Vol. 5 No. 4.
- Karinda. 2019, “Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”, Lex Crimen. Vol. V No. 6.
- Made Aprina Wulantika Dewi, 2015, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, Jurnal Harian Regional, Vol. 05 No. 02.
- Moh. Yusuf D.M., 2022, “Politik Hukum Pidana Terhadap Gagalnya Mendaftar Calon DPR/DPRD Dalam Pemilihan Umum”, The Juris Vol. VI No. 1.
- Ray Cita, Arifai, Kamaruddin, 2024, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, Jurnal Publicuho, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Kendari, Vol. 7 Nomor 1.
- Sinaga Hasudungan, 2023, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut

Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (Iaim-Nu) Nu Metro", IBLAM Law Review, Vol. 3 No. 2.

Winda Wahyu Ningtyas, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 4.

Yudistira Nugroho, 2022, "Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Criminal Action Against The Use Of Fake Diplomas", Jurnal Pengabdian, Fakultas Hukum, Universitas Abdulrachman Saleh Situbondo, Vol. I No. 2.

Yusrizal Reski Tanjung, 2021, "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Huku (JIMHUM), Vol. 1 No. 3.

INTERNET

Administrator, *Tahun 2025 Mulai Berlaku E-Ijazah Digital*, 11 Februari 2025, <https://sdnegeri1bandaaceh.sch.id/detail/tahun-2025-mulai-berlaku-e-ijazah-digital>, diakses tanggal 28 April 2025

Herliana, 2022, *Pentingnya Ijazah Bagi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja*. <https://www.scribd.com/document/612079263/Pentingnya-Ijazah>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025

Siyam Nur Hindayang, *Das Sein dan Das Sollen*, <https://www.scribd.com/document/600305177/Makalah-Das-Sein-Dan-Sollen> diakses pada tanggal 2 Mei 2025

Sosialisasi Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Dikdasmen.

Willa Wahyuni, *Sanksi Jika Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-ijazah-palsu-lt655e87d05a660/>, pada tanggal 2 Mei 2025.

https://www.scribd.com/document/823244528/Sosialisasi-Permendikbudristek-No-58-Tahun-2024-tentang-Ijazah-Dikdasmen?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 19 Mei 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu.